



Seminar dan Loka Karya

Mendorong Agenda Pro Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan di Kalimantan Utara

1 NOVEMBER 2018

Pada tanggal 1 November 2018 bertempat di Hotel Crown, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Walhi menyelenggarakan kegiatan Semiloka bertajuk 'Mendorong Agenda Pro Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan di Kalimantan Utara'. Acara tersebut didukung oleh Pemerintah Daerah dan dihadiri oleh para tokoh-tokoh perempuan dan komunitas pengelola sumber daya hutan di Kalimantan Utara.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kaltara Bapak Edi Soeharto yang mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Tampil sebagai narasumber adalah Istri Gubernur Kalimantan Utara Ibu Rita Ratina Irianto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK provinsi Kalimantan Utara, Ibu Hanifah sebagai Ketua Forhati, Risma Umar Ketua Dewan Nasional Walhi serta Bapak Nurul Mujib Lamunsari dari Koran Kaltara. Sedangkan dari Kementerian LHK, narasumber adalah Kepala Pusat Penyuluhan mewakili Kepala Badan PPSDM Kementerian LHK.

Kepala dinas kehutanan kaltara dalam sambutannya menyampaikan bahwa hutan di Kaltara sangat potensial dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong peningkatan peran wanita dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta mengelola aset alam. Menurut Edi, peranan wanita sangatlah penting dalam kemajuan daerah maupun bangsa.



Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Penyuluhan menyampaikan bahwa hutan sebagai penopang pembangunan nasional memiliki potensi sebagai sumber kekayaan hayati baik berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu, sebagai sistem penyangga kehidupan serta penyedia sumber pangan berkualitas. Pembangunan kehutanan oleh Kementerian LHK telah lama berprespektif gender, bukan hanya dari sisi akses, tetapi juga partisipasi, pengawasan dan manfaatnya bagi laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender dilakukan oleh KLHK melalui pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang responsive gender dilakukan dengan mendorong peran perempuan serta menekankan perubahan cara berfikir bagi setiap orang agar mau dan mampu untuk berbagi ruang akses kelola, ruang ilmu, ruang kebijakan, ruang implementasi dan ruang manfaat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang semuanya itu pada intinya bermuara pada kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.



Sampai dengan saat ini telah banyak perempuan pejuang lingkungan yang berhasil menerima kalpataru, sebagai penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.



Beberapa kelompok wanita tani (KWT) yang berhasil dalam mengelola hutan dan mandiri antara lain KWT Dewi Sri di Desa Bojong Picung di Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang dapat menghasilkan cuka kayu 150 liter per bulan, arang kayu dan usaha penggilingan beras.

Pada tahun 2011 KWT ini

berhasil menjadi kelompok masyarakat usaha mikro pengembangan pangan local berprestasi dalam rangka hari pangan sedunia tingkat Jawa Barat. Kelompok Tani Hutan (KTH) Srikandi di desa Welahan, Wonoroto, Watumalang Wonosobo Jawa Tengah dengan usaha lebah madu dan tanaman sayuran serta bank sampah dan jamur tiram serta ternak kambing, dengan anggota 33 orang. Kelompok-kelompok ini dalam perjalanannya didampingi oleh penyuluh kehutanan setempat. Semoga keberhasilan kelompok wanita tani ini dapat menginspirasi para perempuan di Kaltara untuk juga berhasil menjadi kelompok-kelompok wanita tani yang berhasil.

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang responsive gender. Perhutanan sosial :

1. Memberikan akses bagi masyarakat untuk bekerja secara legal di lahan hutan negara à partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
2. Masyarakat sekitar hutan yang miskin dan rawan pangan bisa memperoleh manfaat langsung berupa hasil hutan dan manfaat tidak langsung sebagai sistem mata pencaharian (agroforestry, agrosylvopasture, dan agrosilvo-fishery) untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pemanfaatan SDH secara berkelanjutan dan lestari.
3. Perhutanan Sosial dengan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan lestari melalui pemberdayaan masyarakat dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan.

